

IMPLEMENTING LEGAL AID IN INDONESIA

KRISTOMO CONSTANTINUS

DEPUTY DIRECTOR OF LEGAL AID, MINISTRY OF LAW AND HUMAN RIGHTS

INDONESIA

LAW AND REGULATIONS ON LEGAL AID in Indonesia

Article 28D of the 1945 Constitution states that “Everyone is entitled to the recognition, guarantee, protection, legal certainty of justice and equal treatment before the law”

Legal Aid is a National Program based on Law no. 16 Year 2011 about Legal Aid

Government Regulation Number 42 year 2013 on Requirements and Mechanism of Legal aid and Legal Aid Fund Distribution.

REGULATION ON SERVICE STANDARD

- Minister of Law And Human Rights Regulation Number 63 year 2016 jo. Minister of Law And Human Rights Regulation Number Number 10 Year 2015 Implementation of Government Regulation Number 42 Year 2013
- Minister of Law And Human Rights Decree Number M.HH-03.HN.03.03 Year 2013 on Cost Standard of Legal Aid.
- Technical Guidance on Legal Aid Disbursement Number PHN-HN.03.03-42 Date 29 January 2016
- Technical Guidance on Monitoring and Evaluation of Legal Aid number PHN-HN.03.03-36 date 29 January 2016
- Minister of Law And Human Rights Regulation number.... Year 2017 on Paralegal.

Regulation on Legal Aid Provider

- Minister of Law And Human Rights Regulation Number 3 Year 2013 on Mechanism of Verification/Accreditation.
- Minister of Law And Human Rights Decree Number M.HH-01.HN.03.03 Year 2016 Verification/accreditation result 2016 until 2018

LEGAL AID SCHEME

NATIONAL LAW DEVELOPMENT AGENCY, MINISTRY OF LAW AND HUMAN RIGHTS

BUDGET

REGULATIONS



405 LEGAL AID PROVIDERS (CSO)

LITIGATION

NON LITIGATION



POOR PEOPLE, MARGINALIZED, VULNERABLE

POVERTY PROOF LETTERS

Legal aid service

Litigation

Criminal
Private
Administration

Non litigation

- 1 Consultation,
2. Mediation,
3. Negotiation,
4. Investigation,
5. Out-of-court Custody,
6. Document drafting,
7. Legal awareness campaign,
8. Legal research
9. People legal empowerment

LEGAL AID PROVIDERS

A = 13 LAP

B = 61 LAP

C = 331 LAP

Total = 405 LAP

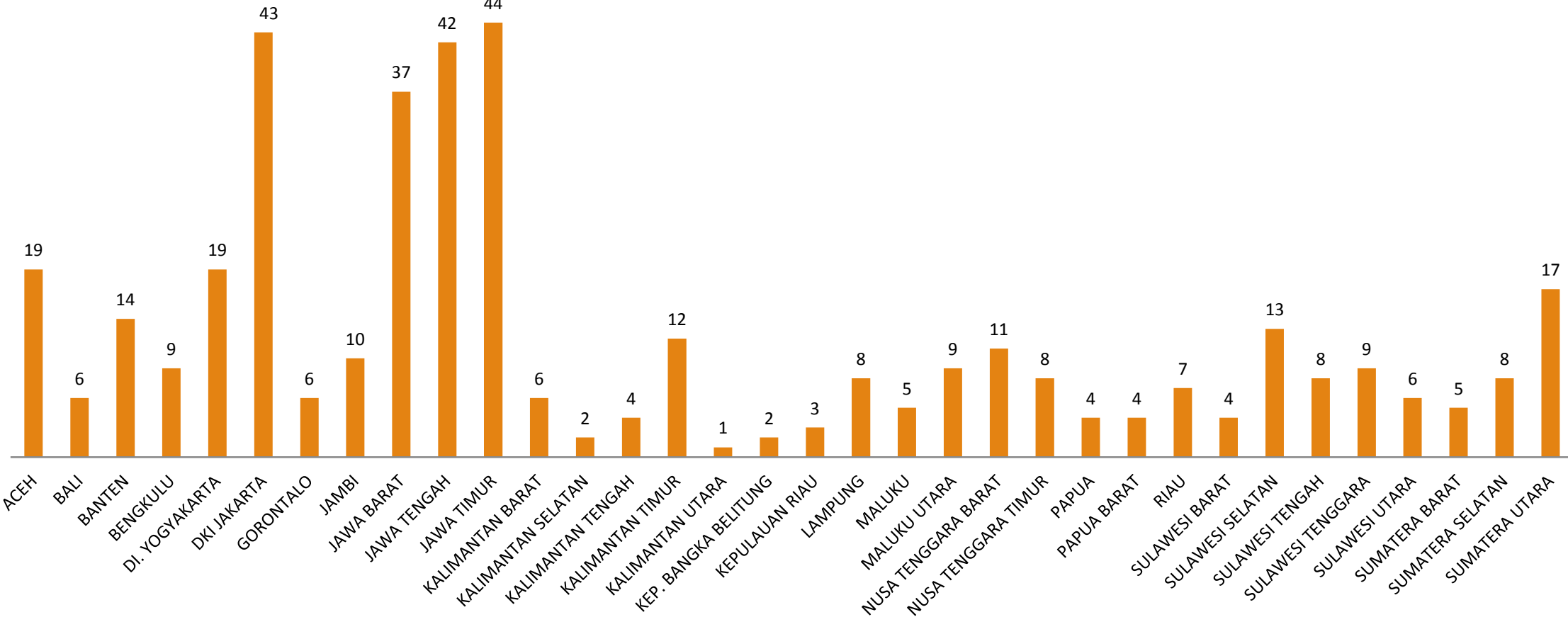
ADVOCATES AND PARALEGALS

Advocates: 2070

Paralegals: 2250

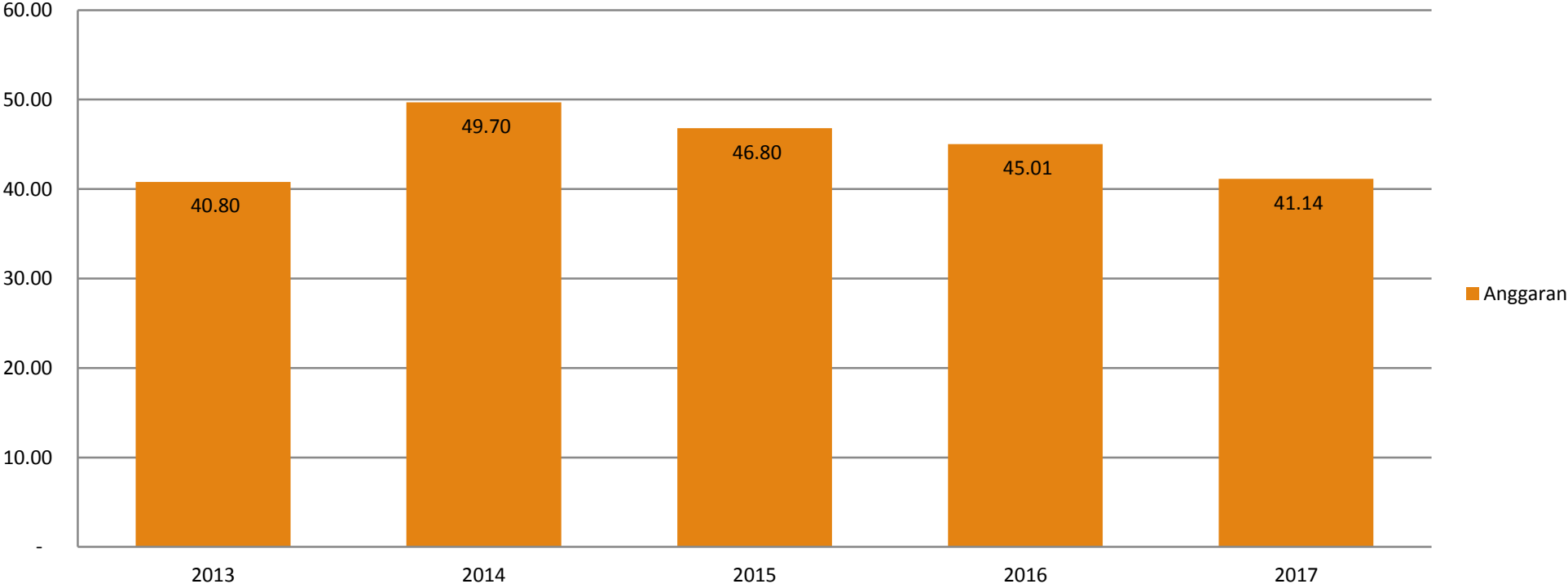
DISTRIBUTION OF LEGAL AID PROVIDERS

PER PROVINCE

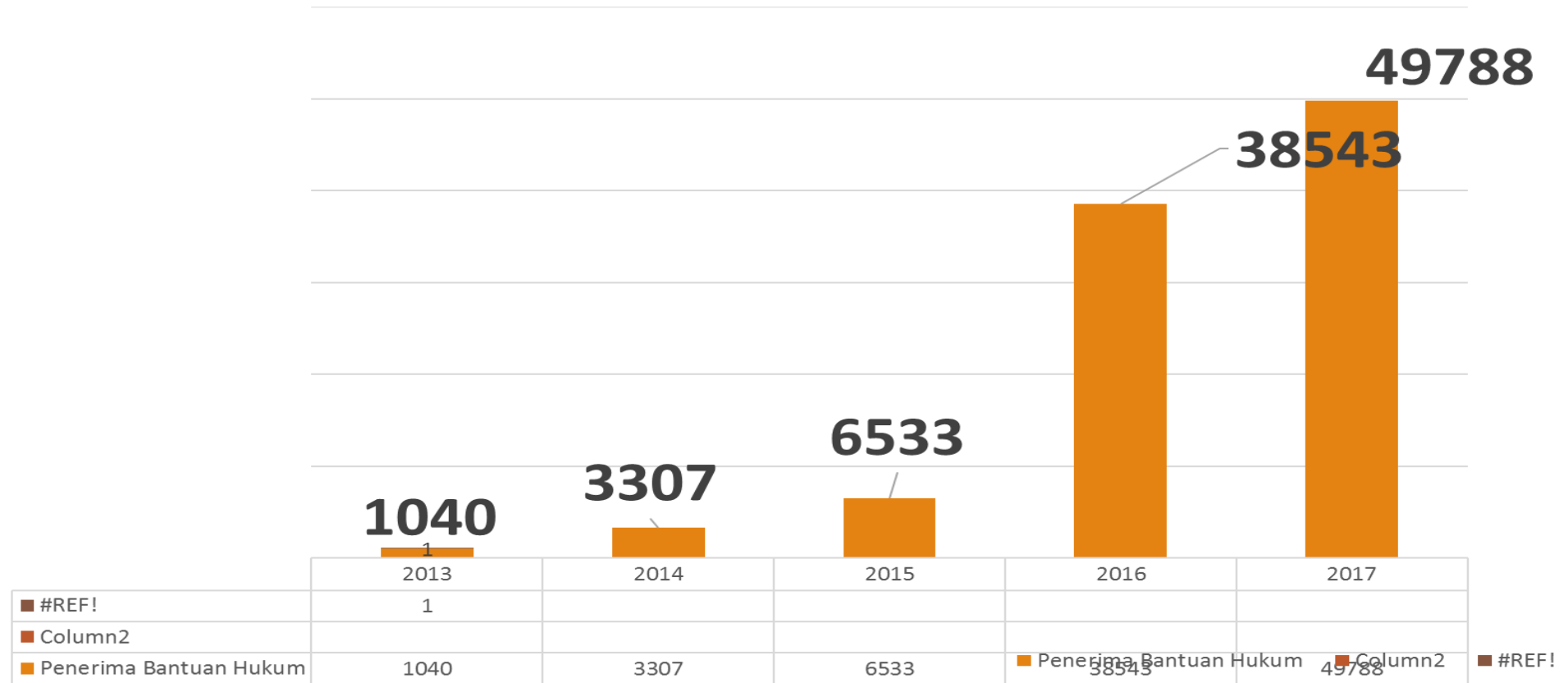


LEGAL AID STATE BUDGET

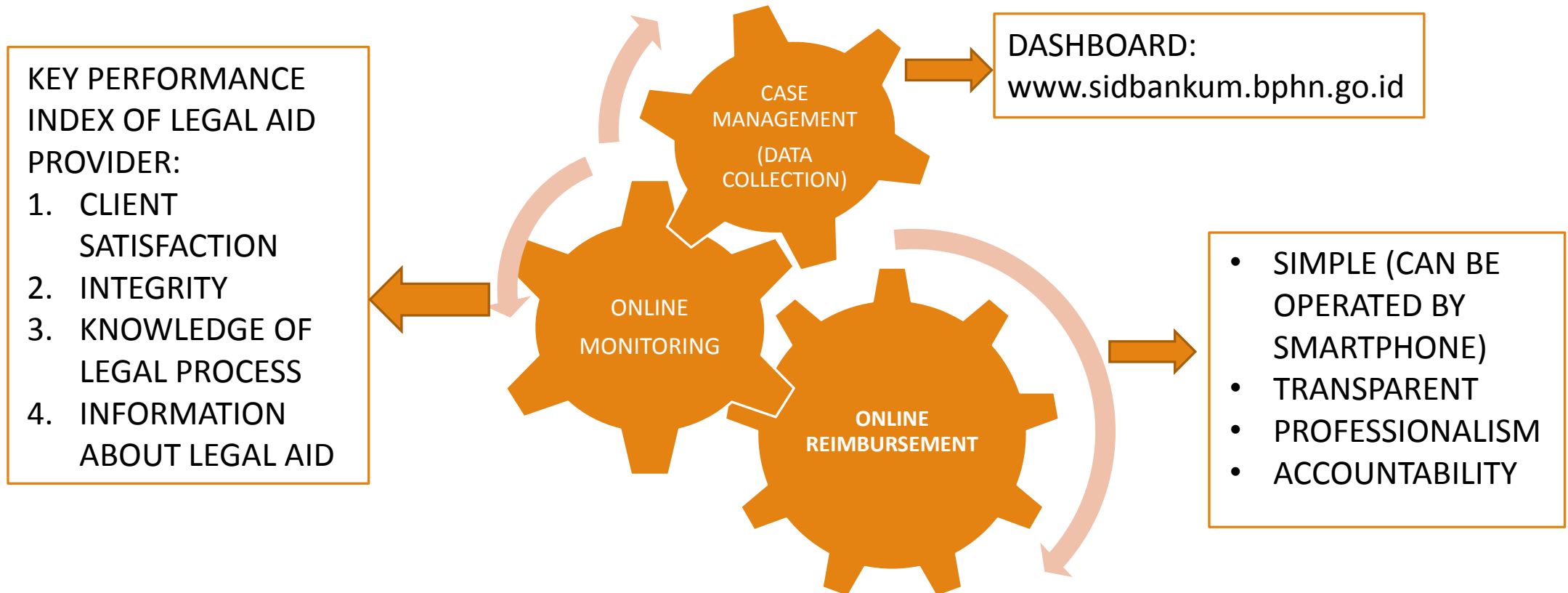
Anggaran



BENEFICIARIES



USING APPLICATION: DATABASE INFORMATION SYSTEM OF LEGAL AID



Dashboard



bphn

Badan Pembinaan Hukum Nasional
Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia

Masuk

Daftar Verasi

Penyerapan Anggaran



Target Anggaran
Rp. 44.983.620.000

Sisa Anggaran
Rp. 3.507.182.975

Pengumuman

PENGUMUMAN ADDENDUM II

Lihat

Surat Edaran tentang Mekanisme Perjanjian Tambahan/Adendum Kontrak Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun 2016

Lihat

Hati-hati terhadap penipuan

Lihat

SURAT EDARAN TENTANG PERCEPATAN SERAPAN ANGGARAN DAN PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM TAHUN 2016

Lihat

PERJANJIAN KERJA SAMA BPHN-MA-KEJAKSAAN-KEMENDES

Lihat

- User OBH (PAPUA BARAT)
- Beranda
- Daftar Permohonan +
- Buat Permohonan +
- Permohonan Lanjutan 2015
- Daftar BAST
- Daftar BAST Lanjutan
- Edit Profil OBH
- Pelaporan Kwitansi

Daftar Permohonan Bantuan Hukum

Pengajuan Permohonan Bantuan Hukum



2016

Total: 35 data

No.	Nomor Permohonan	Nama Penerima Bantuan Hukum	Litigasi/Non Litigasi	Tahap	Urutan Proses	Aksi
1	00040.92.01.PID.BPHN.2016	Herman	Pidana	Persidangan	1 2 3	
2	00039.92.01.PID.BPHN.2016	Yance B. Kalami	Pidana	Persidangan	1 2 3	

MONITORING TOOL

Objective:

- Maintain quality as stated in Legal Aid Service Standard

Method: Interview with the beneficiaries



Lampiran 1 (Kuesioner untuk Dewasa)

KUESIONER

Monitoring dan Evaluasi Program Bantuan Hukum

Identitas Responden

1. Nama
2. Jenis Kelamin - Perempuan - Laki-laki
3. UsiaTahun
4. Status Perkawinan
1. Belum menikah 3. Tidak menikah 5. Janda/Duda kematian
2. Menikah 4. Janda/Duda cerai 6. Tidak tahu 7. Tidak Tahu 8. Tidak Jawab
5. Pendidikan formal terakhir yang Bapak/Ibu/Saudara tamatkan :
1. Tidak sekolah 9. Tamat SMP keagamaan
2. Tidak tamat SD 10. Tamat SMA/SMK Umum
3. Tamat SD umum 11. Tamat Madrasah Aliyah
4. Tamat Madrasah Ibtidaiyah 12. Tamat diploma
5. Tamat SD keagamaan lain 13. Tamat SMA keagamaan lain
6. Tidak tahu 14. Tamat sarjana (S1)
7. Tamat SMP umum 15. Tamat sarjana (S2)
77. Tidak Tahu 16. Tamat sarjana (S3)
88. Tidak Jawab
6. Pekerjaan Bapak/Ibu/Saudara
1. Pelajar/Mahasiswa 6. Pegawai BUMN 11. Pekerja lepas/Penggarap
2. Ibu Rumah Tangga 7. Pegawai Swasta Nasional 12. Wirausaha (Non pedagang)
3. Tidak bekerja 8. Pegawai Swasta Asing 13. Pedagang
4. Pensiunan 9. Pegawai Yayasan/LSM 14. Lainnya
5. Pegawai Negeri Sipil 10. Petani/Nelayan/Pemilik 77. Tidak Tahu 88. Tidak Jawab
7. Berapa rata-rata pengeluaran total keluarga (Inti) Bapak/Ibu/Saudara setiap bulan ?
(Bukan pengeluaran individu) Rp.
8. Berapa rata-rata penghasilan total keluarga (Inti) Bapak/Ibu/Saudara setiap bulan ?
(Bukan penghasilan individu) Rp.

Total: 9 data

	Nama Kategori	Jumlah Soal	Bobot
<input type="checkbox"/>	Pengetahuan Tentang Bantuan Hukum	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	Layanan Bantuan Hukum	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	Integritas Bantuan Hukum	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	INFORMASI TENTANG BANTUAN HUKUM	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	PENGETAHUAN TENTANG BANTUAN HUKUM	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	LAYANAN BANTUAN HUKUM	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	INTEGRITAS BANTUAN HUKUM	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	perdata A	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	perdata B	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Constantine

bphn-admin

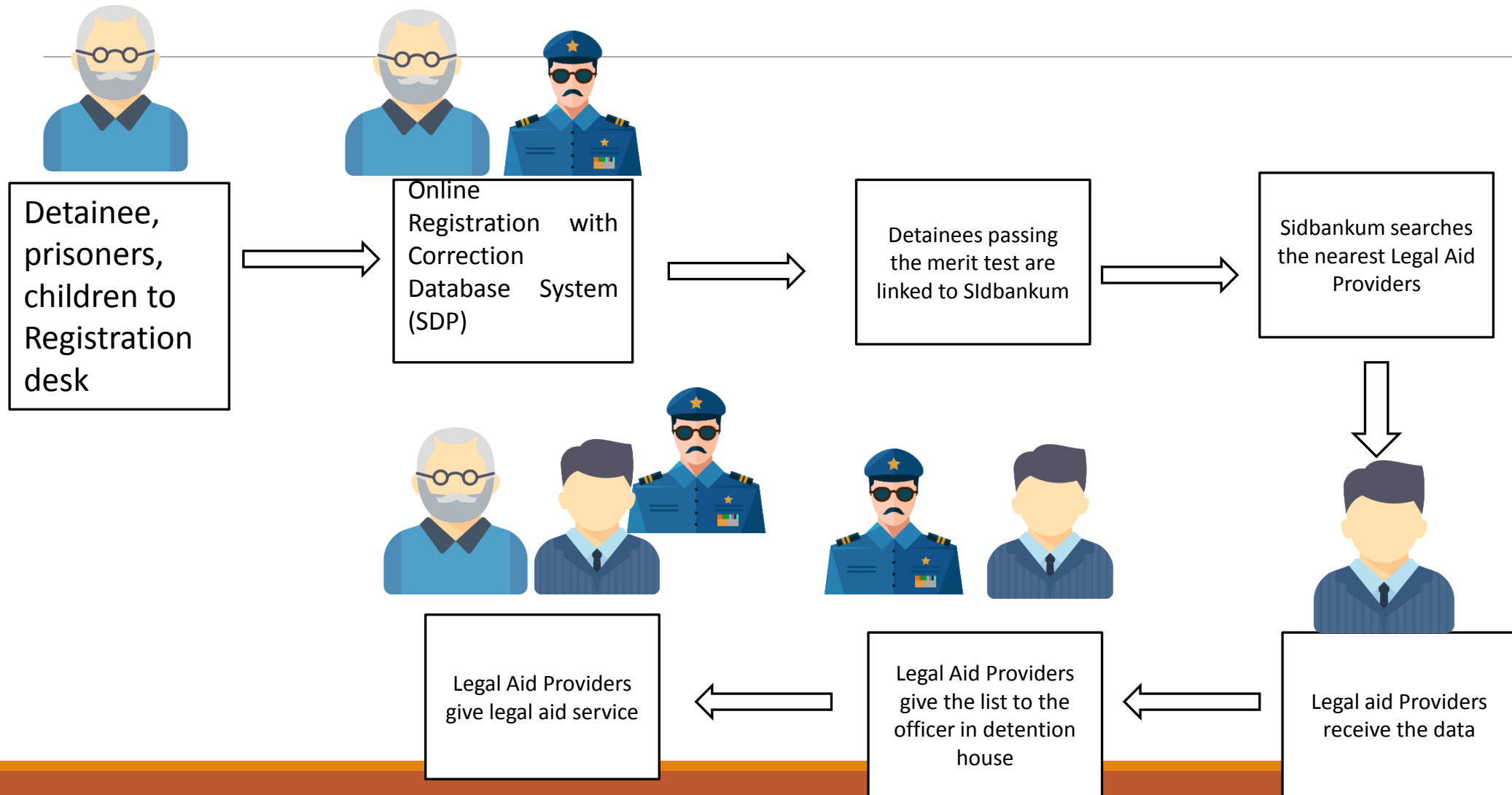
OBH	Keterangan	
	(pilih skala penilaian)	
IMPULAN KELOMPOK KERJA TRANSFORMASI GENDER ACEH (PKKTGA)	Baik	
2 SUMATERA UTARA	YAYASAN PUSAT KAJIAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (PKPA)	Baik
3 SUMATERA UTARA	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM TRISILA NUSANTARA CABANG SUMATERA UTARA	Sedang
4 SUMATERA BARAT	Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Cabang Sumatera Barat	Sedang
5 RIAU	PUSAT ADVOKASI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (PAHAM) INDONESIA CABANG RIAU	Sedang
6 JAMBI	PUSAT ADVOKASI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAMBI	Sedang
7 SUMATERA SELATAN	BIRO KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM FH UNIV PALEMBANG	Sedang
8 BENGKULU	LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU	Sedang
9 LAMPUNG	YAYASAN LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM FIAT YUSTISIA	Sedang
10 KEPULAUAN RIAU	PUSAT ADVOKASI HUKUM & HAK ASASI MANUSIA INDONESIA CABANG KEPULAUAN RIAU	Sedang

Pergi ke halaman: 1 2 3 4 Berikut > Terakhir >>

ENG INTL 11:18 PM 6/7/2018

- Daftar BAST
- Daftar BAST Lanjutan
- Daftar OBH
- Daftar Permohonan Tertolak
- Administration +
- Master Data +
- Front Page +
- Laporan Statistik

Online Legal aid post



Verification/Accreditation

Selecting New Legal Aid Providers and Re-accreditation LAP

Once in 3 years period

Requirements:

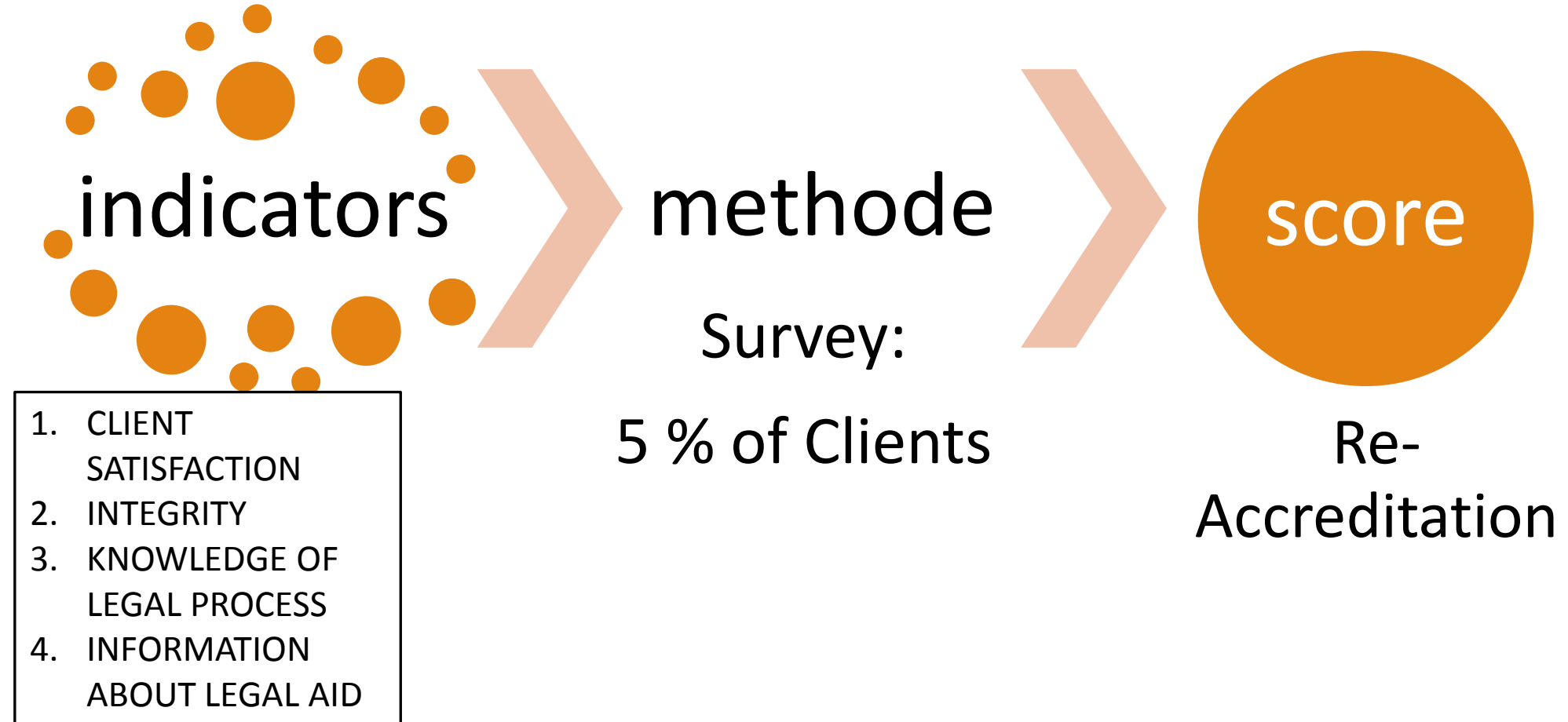
- Legal Entity
- Board of Organization
- Definite Office
- Advocate and paralegals
- Legal Aid Program in 2 years (how many cases and non litigation activities)

New LAP which passes verification will get accreditation based on the numbers of advocates, paralegal and cases/non litigation activities

In 2018, Re-accreditation includes:

- Score of Key Performance index
- Budget spent
- Pro-Bono Cases

WHAT and How to measure



- Panitia Pengawas Daerah (DI YOGYAKARTA)**
- Beranda
- Daftar Permohonan +
- Permohonan Alih Tahun +
- Permohonan Tahunan Selesai
- Permohonan Alih Tahun +
- Permohonan Tahunan Selesai
- Permohonan Alih Tahun +
- Permohonan Alih Tahun +
- Permohonan Tahunan Selesai
- Daftar BAST APBN +
- Daftar BAST APBN Lanjutan
- Daftar OBH
- Data WBP

Penerima Bantuan Hukum

ID OBH :

OBH : YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM SIKAP

No. Bantuan Hukum :

Litigasi Non Litigasi : PTUN

Biodata

Nama :

Tanggal Lahir :

Jenis Kelamin :

Agama :

Status Perkawinan : Sudah Me

Pekerjaan : Buruh

Pendidikan : SMA

Alamat

Provinsi : DI YOGYAKARTA

Kota/Kabupaten : KABUPATEN SLEMAN

Kecamatan : MLATI

Alamat Lengkap : MRANGEN KIDUL

[Kembali](#)

- Panitia Pengawas Daerah**
- Beranda
- Daftar Permohonan +
- Permohonan Alih Tahun +
- Permohonan Tahunan Selesai
- Daftar BAST APBN +
- Daftar BAST APBN Lanjutan
- Daftar OBH

E-MONEV OBH

Nomor Permohonan :

Tanggal Pelaksanaan Wawancara* :

INFORMASI TENTANG BANTUAN HUKUM

DOKUMEN PENDUKUNG

1. Darimana Bapak/Ibu/Saudara mengetahui informasi tentang bantuan hukum ?

Media (koran/ televisi/internet) Saudara/keluarga

Teman/kolega Pengacara/advokat

Iklan layanan masyarakat

2. Siapa Pihak yang menyarankan/mengajak Bapak/Ibu/Saudara untuk mendapat bantuan hukum ?

Keluarga Aktifis/LSM

E-MONEV OBH

Nomor Permohonan :

Tanggal Pelaksanaan Wawancara* : 2018-02-22

INFORMASI TENTANG BANTUAN HUKUM

DOKUMEN PENDUKUNG

1. Darimana Bapak/Ibu/Saudara mengetahui informasi tentang bantuan hukum ?

Media (koran/ televisi/internet) Saudara/keluarga

Teman/kolega Pengacara/advokat

Iklan layanan masyarakat

2. Siapa Pihak yang menyarankan/mengajak Bapak/Ibu/Saudara untuk mendapat bantuan hukum ?

Keluarga Aktifis/LSM

Advokat/pengacara LBH

Kolega/teman

[Kembali](#) [Sebelumnya](#) [Selanjutnya](#)

E-MONEV OBH

Nomor Permohonan

Tanggal Pelaksanaan Wawancara* 2018-02-22

INFORMASI TENTANG BANTUAN HUKUM PENGETAHUAN TENTANG BANTUAN HUKUM LAYANAN BANTUAN HUKUM INTEGRITAS BANTUAN HUKUM

DOKUMEN PENDUKUNG

1. Tahu atau tidak tahukah Bapak/Ibu/Saudara dengan hal-hal berikut ini

Cara mendapatkan bantuan hukum

Aturan etika pekerja bantuan hukum di internal OBH

2. Menurut Bapak/Ibu/Saudara apakah Prosedur bantuan hukum mudah (tidak berbelit belit)?

[← Kembali](#)

[Sebelumnya](#) [Selanjutnya](#)

E-MONEV OBH

Nomor Permohonan

Tanggal Pelaksanaan Wawancara* 2018-02-22

INFORMASI TENTANG BANTUAN HUKUM PENGETAHUAN TENTANG BANTUAN HUKUM LAYANAN BANTUAN HUKUM INTEGRITAS BANTUAN HUKUM

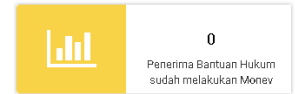
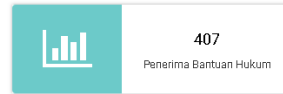
DOKUMEN PENDUKUNG

1. Apakah Bapak/Ibu/Saudara dimintai biaya saat menerima bantuan hukum ?

2. Secara umum puas atau tidak puaskah Bapak/Ibu/Saudara dengan pelayanan bantuan hukum yang pernah dialami tersebut ?

[← Kembali](#)

[Sebelumnya](#) [Selanjutnya](#)



(filter tahun)

Total: 407 data

No.	Nama OBH	Provinsi	No. Bantuan Hukum	Nama Penerima	Litigasi/Nonlitigasi	Aksi
					(pilih kegiatan)	
1	LSM RIFKA ANNISA WOMEN CRISIS CENTER	DI YOGYAKARTA			Perdata	📄 👤
2	LSM RIFKA ANNISA WOMEN CRISIS CENTER	DI YOGYAKARTA			Perdata	📄 👤
3	LSM RIFKA ANNISA WOMEN CRISIS CENTER	DI YOGYAKARTA			Perdata	📄 👤
4	LSM RIFKA ANNISA WOMEN CRISIS CENTER	DI YOGYAKARTA			Perdata	📄 👤
5	LSM RIFKA ANNISA WOMEN CRISIS CENTER	DI YOGYAKARTA			Perdata	📄 👤

LAP KEY PERFORMANCE INDEX

SID BANKUM

11436 Pesan 158 Sistem

bphn admin

Admin Master

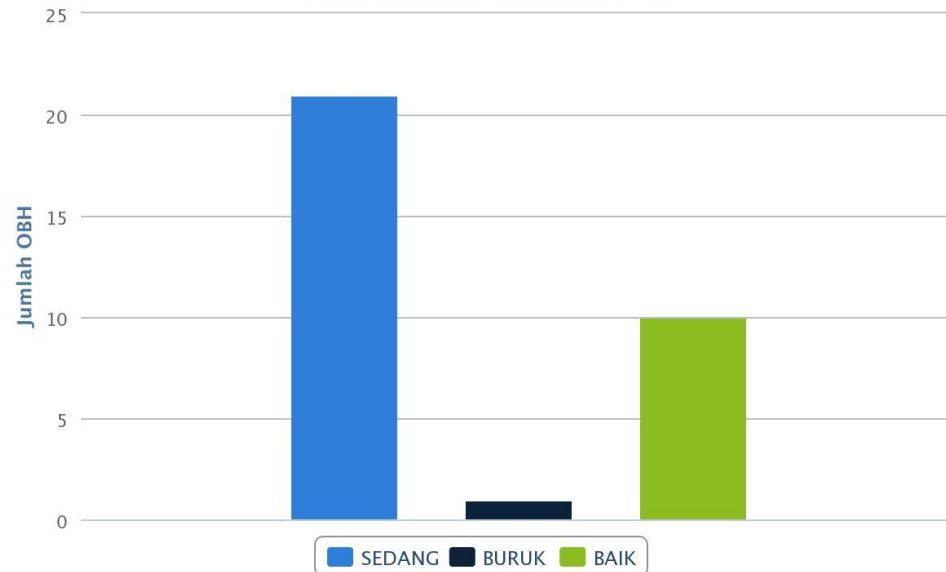
- Daftar Permohonan
- Daftar Permohonan Lanjutan
- Daftar BAST
- Daftar BAST Lanjutan
- Daftar OBH
- Daftar Permohonan Tertolak
- Administration
- Master Data
- Front Page
- Laporan Statistik

HASIL MONEV

Total: 33 data

No.	Provinsi	Nama OBH	Keterangan
	(pilih wilayah)		(pilih skala penilaian)
1	ACEH	PERKUMPULAN KELOMPOK KERJA TRANSFORMASI GENDER ACEH (PKKTGA)	Baik
2	SUMATERA UTARA	YAYASAN PUSAT KAJIAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (PKPA)	Baik
3	SUMATERA UTARA	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM TRISILA NUSANTARA CABANG SUMATERA UTARA	Sedang
4	SUMATERA BARAT	Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Cabang Sumatera Barat	Sedang
5	RIAU	PUSAT ADVOKASI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (PAHAM) INDONESIA CABANG BIAH	Sedang
6	JAMBI		
7	SUMATERA SELATAN		
8	BENGGULU		
9	LAMPUNG		
10	KEPULAUAN RIAU		

Diagram Skala Penilaian OBH



Apakah dokumen fisik perlu untuk dikirimkan lagi jika sudah menggunakan Aplikasi SID BANKUM ONLINE ?

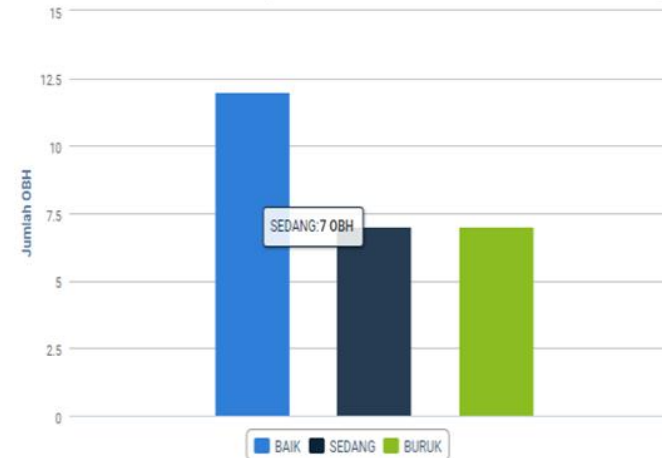
Bagaimana caranya Pengguna meminta bantuan terkait dengan Aplikasi SID BANKUM Online ?

Mengapa ketika ingin mengupload kontrak OBH pada aktivasi akun selalu gagal ?

- Manual Book Permohonan Bantuan Hukum (Non Litigasi) [Lihat](#)
- Manual Book Cara Melakukan Aktivasi Akun OBH [Lihat](#)
- Cara Mengajukan Permohonan Bantuan Hukum (Litigasi) [Lihat](#)
- Cara Mengajukan Pemohonan [Lihat](#)

Money Online

Diagram Skala Penilaian OBH



Video



Testimoni

Dokumen

Surat Edaran Akreditasi Ulang OBH

Lihat

In Progress: 5 stars Rating directly from client



IOS/ANDROID LEGAL SMART CHANNEL





Peta Penyebaran Akses Keadilan Republik Indonesia

Myanmar (Burma)

Tips Cerdas Hukum
Informasi apa yang ingin anda ketahui

Bantuan Hukum

DKI JAKARTA

CARI

WA Australia SA NSW VIC

Google

- Penyuluh Hukum
- Kelompok Sadar Hukum
- Desa Sadar Hukum
- Organisasi Bantuan Hukum
- Rutan/Tahanan
- Penduduk Dengan Pendapat..
- Data Kepolisian

ACEH

CARI

Google

EXPANDING LEGAL AID

ACCESS TO JUSTICE

Goal

Public legal awareness (MID TERM National Development)

● PARALEGAL

- Community → CSO
- village → Ministry of Village, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration
- LAP → Ministry of Law & HR

“O V O P”

● LEGAL AID PROVIDER

● PUBLIC LEGAL EDUCATOR

EMPOWERING PARALEGAL

1. Paralegal has been active in giving legal aid services far before the legal aid law
2. Problems of Paralegal:
 - a) legitimation
 - b) Competence
 - c) Monitoring
3. REGULATION:
 - a) LEGAL AID LAW ARTICLE 9 letter a : Legal aid provider can recruit advocate, paralegal, lecturer and students of Law Faculty
 - b) Minister of Law And Human Rights Regulation number 1 Year 2018 on Paralegal in Legal Aid Delivery